

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Di Era Biden: Implikasi Bagi Hubungan Internasional

Dindha Citra Pramesty

Department International Relations, University of Muhammadiyah Malang

e-mail : dindhacitrapramesty26@webmail.umm.ac.id

Gonda Yumitro

Department International Relations, University of Muhammadiyah Malang

e-mail : dindhacitrapramesty26@webmail.umm.ac.id

Abstract

A change of leadership in the United States (US) always marks a significant change in foreign policy, which has a broad impact on international relations. This article analyzes the shift in US foreign policy in the Biden era and its implications for the dynamics of international relations. Through in-depth research and policy analysis, this article highlights the main directions of US foreign policy under President Joe Biden's administration, including the restoration of traditional alliances, emphasis on multilateralism, handling global crises such as climate change and the COVID-19 pandemic, and adjusting relations with countries -rival countries such as China and Russia. In this context, this article also evaluates the implications of these policy changes for regional stability, global security, and the international order as a whole.

Keyword: *US Foreign Policy, Biden Era, Multilateralism, Regional Stability*

Abstrak

Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS) selalu menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri, yang berdampak pada hubungan internasional secara luas. Artikel ini menganalisis pergeseran kebijakan luar negeri AS di pemerintahan Biden dan implikasi bagi dinamika hubungan internasional. Melalui penelitian yang mendalam dan analisis kebijakan, artikel ini menyoroti arah utama kebijakan luar negeri AS dalam naungan pemerintahan Presiden Joe Biden, termasuk pemulihan aliansi tradisional, penekanan pada multilateralisme, penanganan krisis global seperti perubahan iklim dan pandemi COVID-19, serta penyesuaian hubungan dengan negara-negara saingan seperti Tiongkok dan Rusia. Dalam konteks ini, artikel ini juga mengevaluasi implikasi dari perubahan kebijakan ini terhadap stabilitas regional, keamanan global, dan tatanan internasional secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri AS, Era Biden, Multilateralisme, Stabilitas Regional

Overview

Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS) selalu menjadi peristiwa yang memperoleh perhatian dunia, terutama dalam konteks kebijakan luar negeri AS yang memiliki dampak signifikan bagi dinamika hubungan internasional. Setiap presiden AS membawa visi dan pendekatan yang unik terhadap masalah-masalah global, yang tercermin dalam kebijakan luar negeri yang diterapkan selama masa kepemimpinannya. Pada tahun 2021, kepemimpinan

Presiden Joe Biden menandai awal dari perubahan kebijakan luar negeri AS yang telah diantisipasi dengan seksama oleh aktor-aktor internasional. Di bawah pemerintahan Biden, AS telah menyatakan komitmennya untuk memulihkan peran dan reputasinya di panggung internasional, dengan fokus pada pemulihan aliansi tradisional, penekanan pada multilateralisme, dan penanganan isu-isu global yang mendesak seperti perubahan iklim, kesehatan global, juga ketidakstabilan regional. Perubahan-perubahan ini menandai pergeseran yang signifikan dalam kebijakan luar negeri AS dari pendekatan yang ditempuh oleh pemerintahan sebelumnya, dan dengan demikian, memberikan dampak yang luas terhadap tatanan internasional secara keseluruhan.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika global dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Setiap transisi kepemimpinan di Gedung Putih biasanya membawa perubahan besar dalam pendekatan dan prioritas kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, masa kepresidenan Joe Biden telah menandai pergeseran yang mencolok dari pendekatan pemerintahan sebelumnya di bawah Donald Trump. Pendekatan "America First" yang diusung Trump lebih berfokus pada unilateralisme dan sering kali mengabaikan norma-norma multilateral. Sebaliknya, pemerintahan Biden telah mengembalikan fokus pada multilateralisme, kerja sama internasional, dan penegasan kembali komitmen Amerika terhadap aliansi dan perjanjian internasional.

Ketika Biden mengambil alih jabatan, dunia sedang menghadapi berbagai tantangan global yang memerlukan tanggapan kolektif. Pandemi COVID-19, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan ancaman terhadap demokrasi adalah beberapa isu utama yang membutuhkan kerja sama internasional. Biden berkomitmen untuk memulihkan peran Amerika sebagai pemimpin global yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri di era Biden menunjukkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk pendekatan multilateral, hubungan dengan negara-negara besar seperti China dan Rusia, fokus pada hak asasi manusia, dan kebijakan iklim global.

Perubahan ini tidak hanya merefleksikan pergeseran dalam strategi kebijakan luar negeri Amerika, tetapi juga membawa implikasi besar bagi hubungan internasional secara keseluruhan. Dengan mengembalikan kepercayaan sekutu dan mitra internasional, serta memperkuat komitmen terhadap isu-isu global, pemerintahan Biden bertujuan untuk membangun dunia yang lebih stabil, aman, dan berkelanjutan. Dalam jurnal ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek perubahan kebijakan luar negeri AS di era Biden dan menganalisis dampaknya terhadap hubungan internasional.

Dalam konteks ini, analisis mendalam tentang perubahan kebijakan luar negeri AS di era Biden menjadi sangat penting bagi pemahaman tentang dinamika hubungan internasional saat ini dan masa depan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pergeseran kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Biden, serta implikasinya bagi berbagai aspek hubungan internasional. Dengan mempertimbangkan peran AS sebagai kekuatan global utama, penelitian ini akan menyajikan analisis yang mendalam tentang arah dan dampak dari kebijakan luar negeri AS di era Biden terhadap stabilitas regional, keamanan global, dan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis komparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk

membandingkan kebijakan luar negeri AS di era Biden dengan kebijakan sebelumnya dan membandingkan respons internasional terhadap perubahan tersebut. Dengan demikian, metodologi ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk analisis yang komprehensif tentang dinamika perubahan kebijakan luar negeri AS dan dampaknya bagi hubungan internasional. Pengumpulan data menggunakan, artikel, jurnal, google scholar untuk membantu penulis menyusun artikel.

Pendekatan Dan Teori

Dalam konteks perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di era Biden, pendekatan yang signifikan adalah Realisme. Teori realisme dalam hubungan internasional menekankan kepentingan negara-negara dalam mencapai keamanan dan kekuatan relatif di dalam sistem internasional. Dalam era Biden, realisme mengalami penyesuaian dengan menambahkan elemen nilai-nilai seperti demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga tercipta apa yang sering disebut sebagai "realisme berbasis nilai". Realisme menganggap negara sebagai aktor utama yang bertindak rasional untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, dalam era Biden, teori realisme tetap menjadi kerangka penting dalam menganalisis dan memahami kebijakan luar negeri AS. Implikasinya bagi hubungan internasional mencakup dinamika persaingan kekuatan, perubahan dalam dinamika aliansi dan kemitraan, serta penyesuaian dalam tindakan dan respons negara-negara lain terhadap perubahan dalam kebijakan luar negeri AS.

The Findings

- **Hubungan Dengan China**

Hubungan antara AS dan China di era Biden tetap kompleks dan penuh tantangan. Di satu sisi, terdapat upaya untuk mengatasi persaingan yang intensif dalam bidang ekonomi dan teknologi. Biden mempertahankan beberapa kebijakan keras dari era Trump, seperti tarif perdagangan dan pembatasan terhadap perusahaan teknologi China. Namun, Biden juga berusaha untuk mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan terkoordinasi dalam menghadapi China. Ini termasuk upaya untuk membangun koalisi internasional yang lebih luas dengan sekutu-sekutu di Asia dan Eropa.

Biden juga menekankan pentingnya dialog dan diplomasi langsung dengan China. Meskipun ketegangan tetap ada, terutama terkait dengan isu-isu seperti Taiwan, Laut China Selatan, dan hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong, pemerintahan Biden berupaya untuk mengelola konflik ini melalui diplomasi dan kerja sama internasional. Selain itu, Biden berusaha untuk menemukan area kerja sama yang potensial dengan China, seperti dalam isu perubahan iklim, di mana kedua negara memiliki kepentingan bersama.

Biden juga berfokus pada penguatan aliansi dengan negara-negara lain untuk menghadapi dominasi ekonomi dan teknologi China. Hal ini terlihat dalam upayanya memperkuat kerja sama dengan sekutu di Asia dan Eropa, serta dalam inisiatif untuk membangun rantai pasokan yang lebih resilient yang tidak terlalu bergantung pada China. Di sektor teknologi, AS meningkatkan kontrol ekspor dan investasi asing untuk melindungi teknologi kritis dari potensi penyalahgunaan oleh China.

Selain isu ekonomi dan teknologi, pemerintahan Biden juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di China, khususnya terkait dengan perlakuan terhadap Muslim Uighur di

Xinjiang dan tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Kritik ini menyebabkan ketegangan lebih lanjut, dengan China menuduh AS mencampuri urusan dalam negerinya. Dalam hal keamanan, Laut China Selatan tetap menjadi titik panas dalam hubungan AS-China. AS terus melakukan operasi kebebasan navigasi untuk menantang klaim teritorial China yang luas di wilayah ini, sementara China meningkatkan kehadiran militernya. Situasi di Taiwan juga menjadi sumber ketegangan, dengan AS memperkuat dukungan militernya untuk Taiwan di tengah meningkatnya tekanan dari China.

Namun, pemerintahan Biden juga berusaha untuk menemukan area kerja sama dengan China, terutama dalam isu perubahan iklim. Kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan energi terbarukan. Kerja sama dalam masalah iklim mencerminkan kesadaran bahwa beberapa tantangan global hanya bisa diatasi melalui kolaborasi. Secara keseluruhan, hubungan AS-China di era Biden adalah campuran antara persaingan dan kerja sama. Biden berusaha untuk menyeimbangkan antara menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kebangkitan China dan mencari cara untuk bekerja sama dalam isu-isu global yang mendesak. Pendekatan ini mencerminkan realitas kompleks dari salah satu hubungan bilateral terpenting di dunia, yang berdampak signifikan pada stabilitas dan kemakmuran global.

- **Kebijakan Ekonomi dan Teknologi**

Pemerintahan Biden mewarisi hubungan yang tegang dalam bidang ekonomi dan teknologi dari era Trump. Biden mempertahankan beberapa kebijakan keras terhadap China, terutama terkait dengan perdagangan dan teknologi. Namun demikian, pendekatan Biden cenderung lebih terkoordinasi dan multidimensional. Sebagai contoh, AS terus menekan China terkait dengan isu hak kekayaan intelektual, akses pasar, dan praktik perdagangan yang tidak adil. Namun, dalam menghadapi masalah teknologi seperti keamanan jaringan 5G dan kecerdasan buatan, Biden mengejar upaya koordinasi dengan sekutu-sekutu di Asia dan Eropa untuk memperkuat posisi AS dalam menentang dominasi China dalam sektor-sektor ini.

- **Strategi Diplomatik**

Pemerintahan Biden mengakui pentingnya pembentukan strategi diplomatik yang kuat dalam menghadapi China. Hal ini tercermin dalam upaya untuk membangun koalisi internasional yang lebih luas untuk menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan China. Dalam hal ini, Biden telah meningkatkan konsultasi dengan sekutu-sekutu di Asia dan Eropa, seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Eropa. Kerjasama multilateral semacam ini bertujuan untuk menegaskan posisi bersama terhadap masalah seperti keamanan regional, hak asasi manusia, dan perubahan iklim. Meskipun demikian, Biden juga menegaskan pentingnya menjaga saluran komunikasi langsung dengan pemerintah China untuk mencegah eskalasi konflik yang tidak diinginkan.

- **Dampak Pada Stabilitas Regional dan Global**

Hubungan AS-China memiliki dampak besar pada stabilitas regional dan global. Di Asia-Pasifik, kehadiran militer yang kuat dari kedua negara menimbulkan ketegangan, terutama di sektor Laut China Selatan dan Laut China Timur. Pendekatan yang cermat

dari pemerintahan Biden dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah konflik terbuka. Namun demikian, persaingan ekonomi dan teknologi yang intensif antara AS dan China berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi global. Oleh karena itu, penting bagi AS untuk membangun keseimbangan yang seimbang antara kompetisi dan kerja sama dalam hubungan dengan China guna memastikan stabilitas dan keamanan regional serta global.

Dalam konteks hubungan internasional, pendekatan Amerika Serikat terhadap China di bawah pemerintahan Biden memiliki dampak yang luas dan signifikan. Sifat hubungan antara Amerika Serikat dan China tidak hanya memengaruhi kedua negara itu sendiri, namun juga tren politik, ekonomi, dan keamanan di dunia. Oleh karena itu, penting bagi Amerika Serikat dalam mempertimbangkan implikasi jangka panjang kebijakan luar negerinya terhadap Tiongkok dan terus bekerja sama dengan sekutu internasional untuk mengatasi tantangan yang dihadapi kedua negara.

- **Kebijakan Iklim Global**

Biden telah menegaskan bahwa perubahan iklim adalah salah satu prioritas utama kebijakan luar negerinya. Kembali bergabung dalam Perjanjian Paris adalah langkah pertama yang menunjukkan komitmen AS untuk mengatasi krisis iklim. Biden juga mengumumkan target ambisius untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.

Pemerintahan Biden berupaya untuk memimpin aksi iklim global melalui berbagai inisiatif, termasuk meningkatkan investasi dalam energi terbarukan, mendukung inovasi hijau, dan memperkuat kerjasama internasional dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Biden juga menekankan pentingnya keadilan iklim, dengan memberikan perhatian khusus pada dampak perubahan iklim terhadap komunitas yang rentan dan negara-negara berkembang. Berikut upaya Biden dalam penanganan isu iklim global:

- **Komitmen Terhadap Aksi Iklim**

Pemerintahan Biden menekankan kembali komitmen AS terhadap aksi iklim global dengan mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan ambisius. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan adalah bergabung kembali dengan Perjanjian Paris, yang mengamankan upaya bersama untuk membatasi kenaikan suhu yang bisa mencapai hingga minus 2 derajat Celsius di atas tingkat rata-rata. Biden juga mengumumkan tujuan ambisius untuk menurunkan efek dari emisi gas rumah kaca AS, termasuk rencana untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.

- **Kerjasama Internasional Dalam Isu Lingkungan**

Pemerintahan Biden telah meningkatkan upaya untuk membangun kerja sama internasional dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Hal ini mencakup dialog dan kemitraan yang lebih erat dengan negara-negara lain, terutama sekutu tradisional Amerika Serikat di Eropa dan Asia, serta negara-negara berkembang yang paling mudah terkena efek perubahan iklim. Amerika Serikat juga berkomitmen kembali untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang guna memperkuat ketahanan mereka terhadap perubahan iklim dan mendukung transisi mereka ke energi terbarukan.

- **Implikasi Pada Kemitraan Ekonomi dan Diplomatik**

Kebijakan iklim global AS di bawah pemerintahan Biden memiliki implikasi yang luas pada kemitraan ekonomi dan diplomatis di seluruh dunia. Misalnya, AS telah meningkatkan upaya untuk mempromosikan teknologi dan inovasi hijau melalui kerja sama lintas batas dengan mitra internasional. Selain itu, upaya Amerika Serikat yang lebih ambisius untuk memerangi perubahan iklim dapat membuka peluang baru bagi kerja sama ekonomi di berbagai bidang seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan teknologi ramah lingkungan.

- **Tekanan Terhadap Negara Penghasil Emisi Besar**

Pemerintahan Biden telah meningkatkan tekanan terhadap negara-negara penghasil emisi besar, termasuk Tiongkok dan India, untuk menindaklanjuti lebih mendalam untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Ini mencakup dialog tingkat tinggi dan negosiasi diplomatik, serta upaya untuk memobilisasi komunitas internasional untuk memberikan insentif dan sanksi kepada negara-negara yang tidak memenuhi komitmennya dalam menangani *climate change*.

Kebijakan iklim global yang diperjuangkan oleh pemerintahan Biden mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat tentang urgensi dan pentingnya mengatasi perubahan iklim secara global. Upaya yang diambil oleh AS tidak hanya memiliki dampak langsung pada mitigasi dampak perubahan iklim, tetapi juga membentuk dinamika hubungan internasional dalam upaya bersama untuk melindungi planet kita.

Kesimpulan

Kebijakan luar negeri AS di era Biden telah mengalami perubahan yang signifikan, dengan penekanan yang lebih besar pada multilateralisme, hak asasi manusia, dan perubahan iklim. Dalam kesimpulan ini, penting untuk mencatat implikasi utama dari perubahan kebijakan ini terhadap hubungan internasional secara keseluruhan. Kebijakan yang lebih progresif terhadap multilateralisme telah meningkatkan kembali keterlibatan AS dalam perjanjian internasional dan aliansi tradisional, memperkuat posisinya sebagai pemimpin global. Dalam konteks ini, AS kembali mengambil peran yang lebih aktif dalam penanganan isu global seperti *climate change*, konflik regional, dan krisis kemanusiaan.

Penekanan pada hak asasi manusia telah memberikan sinyal kuat tentang komitmen AS terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebebasan individu di seluruh dunia. Meskipun hal ini dapat memicu ketegangan dengan negara-negara otoritarian, hal ini juga memperkuat posisi AS sebagai pembela hak asasi manusia di tingkat global. Kebijakan yang lebih proaktif terhadap perubahan iklim telah menghasilkan komitmen yang lebih ambisius dari AS dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan energi terbarukan. Ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat tentang urgensi dan pentingnya aksi kolektif dalam menghadapi krisis iklim global. Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri AS di era Biden memiliki dampak yang luas terhadap dinamika hubungan internasional. Mendorong kerja sama multilateral, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim akan menjadi prioritas utama bagi AS dalam upaya membangun dunia yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

Referensi

- Fadhil Haidar Sulaeman, N. S. (2021). Kebiasaan Baru Hubungan Internasional: Potensi Kebijakan Luar Negeri Joe Biden terhadap Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia. Lemhannas RI.
- GIGA. (2021). Joe Biden dan Era Baru Multilateralisme.
- Kurniadi. (2020). Kemenangan Biden dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika. BERITA KAMPUS.
- Matondang, E. (2021). Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era Pemerintahan Biden Dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Indonesia. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara.
- Mustofa, A. Z. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT. Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman .
- PUTRI, G. I. (2023). TUJUAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM PERJANJIAN ABRAHAM TAHUN 2020.
- RAHMADHANI, P. (2023). PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI IMIGRAN ILEGAL DI PERBATASAN DENGAN MEKSIKO .
- RAMADHANI, T. A. (2023). KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ERA JOE BIDEN.
- Team, C. B. (2024). US-China Relations in the Biden Era: A Timeline. China Briefing.
- WOLA. (2022). Biden's First Year Policies toward Latin America.

Dinamika Kejahatan Transnasional Terorganisir: Studi Kasus TRIAD di China

Aisyah Mawar Octavia

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

e-mail: 1002022030@student.uinsby.ac.id

Muhammad Rhenaldy Ferdiansyah

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

e-mail: 10020221056@student.uinsby.ac.id

Nur Ainal Haqqa El Musthafa

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

e-mail: 10030221078@student.uinsby.ac.id

Abstract

The evolution and operations of the TRIAD criminal organization in China have significant implications for global society. Initially emerging as a secret society in the 19th century aimed at overthrowing the Qing Dynasty, the TRIAD evolved into a criminal entity involved in gambling, prostitution, and drug trafficking. With globalization and political-economic changes, the TRIAD expanded its reach internationally, operating in Asia, Australia, Europe, North America, and South Africa. Their illegal activities include narcotics trafficking, human trafficking, product counterfeiting, financial fraud, and operating illegal gambling and prostitution networks. This study employs a qualitative-descriptive method, utilizing secondary data sources like news, official reports, and journal articles, analyzed through data reduction, presentation, and conclusion techniques. The TRIAD's crimes severely impact local economies, environmental stability, and social order. Utilizing modern technology, they adapt to evade law enforcement, making eradication efforts complex. Applying Copenhagen School's securitization theory, this study identifies TRIAD activities as existential threats necessitating urgent security responses. The study concludes that combating the TRIAD requires multifaced approaches, including enhanced international cooperation, effective law enforcement, and social intervention programs to prevent new recruitments, aiming for a comprehensive solution to this serious threat.

Keywords: *Transnational Crime, Securitization, TRIAD, Organize Crime*

Abstrak

Evolusi dan operasi organisasi kriminal TRIAD di China memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat global. Awalnya muncul sebagai perkumpulan rahasia pada abad ke-19 yang bertujuan untuk menggulingkan Dinasti Qing, TRIAD berevolusi menjadi entitas kriminal yang terlibat dalam perjudian, prostitusi, dan perdagangan narkoba. Dengan adanya globalisasi dan perubahan ekonomi-politik, TRIAD memperluas jangkauannya secara internasional, beroperasi di Asia, Australia, Eropa, Amerika Utara, dan Afrika Selatan. Kegiatan ilegal mereka meliputi perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pemalsuan produk, penipuan keuangan, dan mengoperasikan jaringan perjudian dan prostitusi ilegal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan sumber data sekunder seperti berita, laporan resmi, dan artikel jurnal, yang dianalisis melalui teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Kejahatan yang dilakukan oleh TRIAD sangat berdampak pada ekonomi lokal, stabilitas lingkungan, dan tatanan sosial. Dengan menggunakan teknologi modern, mereka beradaptasi untuk menghindari penegakan hukum, membuat upaya pemberantasan menjadi rumit. Dengan menerapkan teori sekuritisasi dari Copenhagen *School*, studi ini mengidentifikasi kegiatan TRIAD sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan tanggapan keamanan yang mendesak. Studi ini menyimpulkan bahwa pemberantasan TRIAD membutuhkan pendekatan multisegi, termasuk peningkatan kerja sama internasional, penegakan hukum yang efektif, dan program intervensi sosial untuk mencegah perekrutan baru, yang bertujuan untuk mendapatkan solusi komprehensif terhadap ancaman serius ini.

Kata Kunci: *Transnational Crime, Securitization, TRIAD, Organize Crime*

Overview

Kejahatan internasional terorganisir kini semakin luas perkembangannya sehingga mengancam stabilitas perdamaian negara-negara dunia. Kegiatan ini mengancam beberapa aspek salah satunya yakni politik dan ekonomi dunia. kejahatan terorganisir seringkali terlibat dalam aktivitas ekonomi yang besar seperti perdagangan ilegal yang dapat merusak stabilitas ekonomi suatu negara serta mengganggu perdagangan internasional. Aktivitas kejahatan terorganisir sejatinya melekat pada kekerasan dan ancaman yang dapat menimbulkan ketegangan sosial sehingga menyebabkan konflik antar kelompok pada suatu negara atau bahkan lintas negara.¹ Selain itu, teknologi modern menjadi salah satu unsur pendorong aktivitas kejahatan ini. Dengan menggunakan teknologi modern seperti internet dan senjata dapat melancarkan kegiatan ilegal. Tentu saja aktivitas yang melibatkan beberapa aspek diatas dapat sangat berdampak dengan mengganggu tata kelola internasional yang dapat mengancam stabilitas global dan perdamaian dunia.

Perkembangan kejahatan terorganisir berawal dari kota-kota besar di dunia salah satunya di kawasan Asia. Kejahatan terorganisir di Asia tidak sebesar seperti pada negara di kawasan Barat dalam skala internasional. Akan tetapi semenjak adanya globalisasi, perubahan ekonomi dan politik pada pertengahan ke-20 di China dan Asia Pasifik menciptakan kondisi baru bagi bentuk kejahatan terorganisir yakni kejahatan terorganisir transnasional. Kegiatan kejahatan terorganisir transnasional ditandai dengan aktivitas lintas batas negara.² Pemberantasan kejahatan terorganisir terasa sulit karena adanya birokrasi yang kaku, pandangan sempit terhadap pertumbuhan ekonomi dan fleksibilitas sindikat kejahatan transnasional. Sindikat kejahatan pertama kali di Asia yakni gangster yang tercipta dari sebuah film yang masuk pada tahun 70an di Korea dan Hongkong. Asia timur mempunyai banyak kelompok kriminal asia yang diaspora,

¹Cheuk, J. 2021. Overview of Organized Crime in East Asia. Medium. <https://medium.com/@brothernumbertthree/overview-of-organized-crime-in-east-asia-414760449cd0>

²Chin, K. 2013. 10 Chinese Organized Crime. Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730445.013.002>

namun ada segelintir orang yang mau mengaku berperan penting dalam kejahatan terorganisir transnasional, selebihnya mereka tidak mengakui dan menyamar.

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kejahatan terorganisir, TRIAD dalam dinamika, persebaran dan proses kriminalitasnya di China. Diketahui bahwa TRIAD awalnya merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan menggulingkan Dinasti Qing. Seiring bergejolaknya ekonomi dan politik di China, TRIAD berubah menjadi organisasi bisnis bawah tanah dan kerap melakukan aksi kriminal di China. Bisnis yang dimaksud disini yakni bisnis perdagangan ilegal seperti jual-beli obat-obatan terlarang atau narkoba, jual-beli senjata serta jual-beli manusia. Tak hanya itu, TRIAD juga melakukan tindakan ilegal lainnya seperti pemerasan, pencucian uang dan lainnya. Karena persebaran kelompok TRIAD ini tersebar luas di Asia termasuk Thailand dan Indonesia. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas lebih mendalam bagaimana sih dinamika terorganisir TRIAD khususnya di China.

Descriptive-Qualitative Method

Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fokus permasalahan penelitian. Metode kualitatif dapat menceritakan atau menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fenomena dengan kaya, kompleks, unik dan luas cakupannya. Lebih lanjut, adanya metode penelitian kualitatif dapat membantu mengidentifikasi pola-pola dan konfigurasi di antara variable.³ Lebih lanjut, penelitian ini secara spesifik menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif-deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara detil dan konkret. Penelitian ini berupaya untuk menemukan banyaknya fakta terhadap suatu isu melalui studi deskripsi yang asli dan tidak berlawanan dengan fenomena yang terjadi.

Artikel jurnal yang berjudul “Dinamika Organisasi Kriminal TRIAD: TRIAD di China” merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Hal ini dikarenakan peneliti mempunyai tujuan dalam mendalami suatu fenomena yang pada hal ini merupakan bagaimana dinamika organisasi kriminal TRIAD, terkhusus Organisasi TRIAD di China secara mendalam dan faktual. Penelitian ini melihat secara detil dinamika organisasi kriminal TRIAD, kemudian secara spesifik melihat bagaimana mereka melakukan kejahatannya, bagaimana persebarannya, dan hal-hal lain yang mempunyai kaitan yang erat.

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian jurnal ini hanya menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi atau melalui sumber data sekunder. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah tercatat atau merupakan catatan peristiwa yang terdahulu yang telah terjadi. Dalam hal ini dapat berupa dokumen yang bersifat publik seperti berita dan laporan resmi atau privat seperti surat dan email.⁴ Selain jenis sifat, ada jenis dokumen yang lain seperti yang berjenis audiovisual dan material

³Shoshanna Sofaer, 1999. “Qualitative Methods: What Are They and Why Use Them?,” Health and Services Research 34, no. 5

⁴Margarete Sandelowski, “Focus on Research Methods : Whatever Happened to Qualitative Description?,” Research in Nursing & Health 23 (2000): hal. 335., [https://doi.org/10.1002/1098-240x\(200008\)23:4%3C334::aid-nur9%3E3.0.co;2-g](https://doi.org/10.1002/1098-240x(200008)23:4%3C334::aid-nur9%3E3.0.co;2-g)

digital seperti website online, teks media sosial, video dan lainnya yang berkaitan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan organisasi TRIAD melalui website berita, buku, artikel jurnal dan lainnya yang relevan dengan penelitian peneliti. Teknik analisis data dari artikel jurnal ini terdapat tiga yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan penyederhanaan data-data dan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi dalam bentuk seleksi.⁵ Selanjutnya adalah penyajian data dan informasi yang telah berhasil disederhanakan secara sistematis dalam bentuk narasi, grafik, dan lainnya. Tujuan dari penyajian data tersebut adalah guna untuk dapat dipahami lebih mudah bagi pembaca penelitian tersebut beserta peneliti itu sendiri. Terakhir adalah penarikan kesimpulan. Tahap ini dicapai jika semua data yang di dapat, disederhanakan dan disajikan sudah cukup banyak.

Dari Perlawanan Revolusioner hingga Organisasi Kriminal Internasional

TRIAD, yang juga dikenal sebagai “*Hongmen*”, berasal dari abad ke-19 sebagai perkumpulan rahasia di antara para imigran China di Asia Tenggara. Pada awalnya, kelompok-kelompok ini memiliki banyak fungsi, beroperasi sebagai agen perekrutan, serikat pekerja, perkumpulan gotong royong, organisasi politik, kelompok ekonomi, dan struktur keagamaan. Mereka sering kali dikendalikan oleh pedagang atau pemilik bisnis penting dan berfungsi sebagai serikat pekerja, memberikan perlindungan dan layanan kepada para pekerja imigran China.⁶ Tujuan awal mereka jauh dari kriminal; mereka bertujuan untuk menggulingkan Dinasti Qing, kekuasaan yang dianggap menindas oleh banyak orang. Semangat revolusioner ini memicu pemberontakan seperti Pemberontakan Taiping (1850-an), yang secara signifikan menentang kekuasaan Dinasti Qing.⁷

Seiring berjalannya waktu, TRIAD memperluas aktivitasnya dan belajar menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Para pemimpin TRIAD terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perjudian, prostitusi, dan perdagangan narkoba pada awal abad ke-20. Pada awal 1900-an, kelompok TRIAD di China telah terjerat dalam kegiatan kriminal. Pergeseran ini semakin dipicu oleh kolaborasi mereka dengan Kuomintang (KMT) selama era Republik China. KMT, yang berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan, dilaporkan menggunakan kekuatan TRIAD untuk melakukan pembunuhan dan taktik intimidasi. Di era modern, TRIAD telah menjadi organisasi kriminal transnasional yang beroperasi di berbagai wilayah, termasuk Australia, Eropa, Jepang, Amerika Latin, Amerika Utara, Rusia, dan Afrika Selatan. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, yang dikenal dengan operasi canggihnya

⁵Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta)

⁶Baffie, J. (2012). The Chinese TRIADs in South-East Asia: from a “total social phenomenon” to a transnational criminal organisation?. In J.-F. Sabouret (Ed.), *The Asian side of the world* (1-). CNRS Éditions. <https://doi.org/10.4000/books.editions-cnrs.12498>

⁷Bancroft, T. A. (2007). The TRIADs: Past and Present. In A. Leveau (Ed.), *Investigating the Grey Areas of the Chinese Communities in Southeast Asia* (1-). Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine. <https://doi.org/10.4000/books.irasec.329>

terutama di Asia Tenggara dan Australia; mereka juga melakukan perdagangan manusia yang sering kali menargetkan individu yang rentan untuk eksploitasi tenaga kerja atau kekerasan seksual; pemalsuan produk elektronik, memanfaatkan permintaan global akan barang murah dan berkualitas tinggi; penipuan keuangan seperti pencucian uang dan penipuan investasi; serta operasi jaringan perjudian dan prostitusi ilegal. Organisasi ini juga sering kali bekerja sama dengan organisasi kriminal lainnya.⁸

Dalam beberapa tahun, Hong Kong telah menjadi pusat operasi TRIAD, dan organisasi ini memainkan peran penting dalam industri kriminal kota. TRIAD menjalin hubungan dekat dengan pemerintah kolonial Inggris selama periode kolonial, sering kali bekerja sama dengan mereka untuk menjaga keamanan sosial dan mencegah gerakan anti-kolonial. Namun, ketika Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) didirikan pada tahun 1974,⁹ TRIAD mulai kehilangan kekuatan karena para anggota seniornya beralih ke bisnis yang sah. TRIAD terus berubah dan berkembang setelah kolonial. Mereka telah mendukung pemerintah China dan menolak demonstrasi pro-demokrasi, antara gerakan politik dan sosial lainnya. TRIAD di Hong Kong sering digambarkan sebagai menghindari penegakan hukum, menggunakan berbagai strategi untuk menghindari penegakan hukum dan mempertahankan aktivitas kriminalnya.

Dampak dan Tantangan Kelompok TRIAD dalam Era Globalisasi

Kejahatan TRIAD memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat global. Posisi TRIAD memang berawal hanya dari gerakan pemberontak di China. Namun sekarang sudah merambah ke negara-negara lain. Kehadiran TRIAD ini perlu diwaspadai, ada beberapa dampak kejahatan dari kelompok TRIAD ini, yaitu:

1) Evolusi Kejahatan dan Adaptasi Teknologi

Sejatinya kelompok kejahatan tidak dapat bertahan lama atau dapat dikatakan musnah, namun beberapa kelompok yang masih bertahan dan memiliki masa yang panjang dapat dikatakan bahwa kelompok kejahatan tersebut melakukan revolusi. Hal tersebut selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh kelompok TRIAD ini sehingga masih bertahan sampai saat ini. Kelompok TRIAD ini telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern dan penguasaan ekonomi global, mereka terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan yang lebih halus dan canggih, seperti perdagangan barang palsu melalui *e-commerce*, peretasan data perusahaan, dan penyelundupan ikan. Hal ini dilakukan oleh kelompok TRIAD untuk tetap relevan dan sulit dilacak oleh penegak hukum.

2) Dampak Lingkungan dan Ekonomi

Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok TRIAD juga dapat berpengaruh terhadap lingkungan, misalnya seperti yang telah dilakukan oleh TRIAD dalam perdagangan ilegal ikan laut, seperti ikan Napoleon. Hal tersebut dapat mengancam lingkungan laut dan juga

⁸Curtis, Glenn E., Seth L. Elan, Rexford A. Hudson, and Nina A. Kollars. 2002. "Transnational Activities of Chinese Crime Organizations." *Trends in Organized Crime* 7 (3): 19– 57. <https://doi.org/10.1007/s12117-002-1011-4>.

⁹Wang P, Kwok SI. Hong Kong TRIADs: the historical and political evolution of urban criminal polity, 1842–2020. *Urban History*. 2023;50(3):445-467. doi:10.1017/S0963926821001024

ekonomi lokal, karena dengan adanya perdagangan ilegal ini harga ikan lokal menjadi lebih tidak tersentuh oleh para pembeli. Selain itu juga perdagangan ilegal rokok dan BBM, tentu hal ini dapat berpengaruh pada pendapatan pajak negara karena perdagangan ilegal tidak menggunakan pajak dan juga lebih murah dibandingkan harga lokal.

3) Tantangan Penegakan Hukum

Telah banyak dilakukan operasional atau penyelesaian masalah kejahatan TRIAD ini. Namun TRIAD memiliki posisi yang unik sehingga mereka dapat menghindari dari hukum yang ada. TRIAD memiliki strategi untuk melakukan perubahan struktur organisasi, sehingga kelompok TRIAD menjadi lebih desentralisasi.

Secara keseluruhan, kejahatan TRIAD memiliki dampak yang luas dan kompleks pada masyarakat global. Mereka mengancam keamanan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan multifaset, termasuk peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum yang lebih efektif, dan program intervensi sosial untuk mengurangi rekrutmen kejahatan di kalangan pemuda.¹⁰

Analisis Sekuritisasi: Ancaman Kelompok TRIAD dan Urgensi Tindakan Keamanan

Sekuritisasi merupakan salah satu teori turunan dari teori keamanan (*security*) yang memiliki sudut pandang lebih luas. Jika pada teori keamanan tradisional aktor dari keamanan yakni negara dan ancaman hanya tertuju pada militer negara, berbeda dengan sekuritisasi. Sekuritisasi menganggap bahwa ancaman tidak hanya tertuju kepada militer saja. Mereka mengidentifikasi lima dimensi keamanan: ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan militer. Sekuritisasi yang dipelopori oleh kelompok pemikir yakni Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde atau biasa disebut *Copenhagen School* memiliki definisi dan cakupan yang lebih luas.¹¹ Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sekuritisasi ini diantaranya, *securitizing actors* mengidentifikasi suatu isu, baik politik maupun non-politik dengan tujuan mengubahnya menjadi isu keamanan. Pada intinya sekuritisasi terdiri dari empat unsur, yaitu Aktor Sekuritisasi (*Securitizing Actors*), Ancaman Eksistensial (*Existential Threats*), Objek Referensi (*Referent Object*), dan Tindakan Ujaran (*Speech Act*).

Berangkat dari 4 unsur diatas dan jika di sambungkan dengan fenomena TRIAD yang ada di China. Pada unsur aktor terlihat jelas bahwa aktor disini ditujukan untuk kelompok TRIAD itu sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kemudian pada unsur Ancaman Eksistensial terdapat pada peran TRIAD dalam mengancam terhadap stabilitas politik dan ekonomi, serta keamanan sosial di China dan negara-negara lain di Asia. Ancaman tersebut seperti perdagangan ilegal, kekerasan, perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan kegiatan kriminal lainnya yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi. Selanjutnya pada unsur objek referensi terletak pada masyarakat dan negara yang terancam oleh aktivitas kriminal TRIAD, seperti China sendiri dan negara-negara lainnya. Dan yang terakhir pada unsur ujaran

¹⁰Justin Heifetz, Upaya Berbahaya Melacak Jejak Anggota TRIAD, <https://www.vice.com/id/article/wnzpbb/upaya-berbahaya-melacak-jejak-anggota-TRIAD>

¹¹Buzan B., Weaver O. & Wilde J. 1998. *Security: A Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers

atau *Speech Act* yakni terletak pada artikel ini yang mana peneliti menyatakan bahwa aktivitas TRIAD merupakan ancaman serius. Dengan mendokumentasikan dan mempublikasikan penelitian ini, peneliti mengupayakan untuk meyakinkan pembaca dan pembuat kebijakan tentang urgensi ancaman yang ditimbulkan oleh TRIAD. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran dan mendorong tindakan keamanan yang lebih efektif untuk menangani kejahatan terorganisir.

Penutup

Artikel ini mengupas secara mendalam tentang evolusi dan operasi kelompok kriminal TRIAD di China, serta dampaknya yang luas terhadap masyarakat global. Pada awalnya, TRIAD muncul sebagai organisasi rahasia di abad ke-19, berfungsi sebagai serikat pekerja dan kelompok ekonomi dengan tujuan politik untuk menggulingkan Dinasti Qing. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok ini bertransformasi menjadi organisasi kriminal yang terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal seperti perjudian, prostitusi dan perdagangan narkoba. Dengan perkembangan globalisasi dan perubahan ekonomi TRIAD berhasil memperluas jangkauan operasinya ke berbagai negara, menjadikan dirinya sebagai organisasi kriminal transnasional. Mereka beroperasi tidak hanya di Asia, tetapi juga di Australia, Eropa, Amerika Utara, dan bahkan Afrika Selatan. Aktivitas ilegal mereka mencakup perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pemalsuan produk, penipuan keuangan, dan pengoperasian jaringan perjudian serta prostitusi ilegal.

Melalui analisis sekuritisasi dari *Copenhagen School*, artikel ini menegaskan bahwa kejahatan TRIAD merupakan ancaman eksistensial yang memerlukan respons keamanan darurat. Proses sekuritisasi ini melibatkan identifikasi ancaman oleh aktor keamanan, yang kemudian mengangkat isu ini ke tingkat yang lebih serius dan mendesak. Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa keberadaan dan aktivitas TRIAD merupakan ancaman serius bagi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di berbagai negara. Upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan multifaset, termasuk peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum yang lebih efektif, dan program intervensi sosial untuk mencegah rekrutmen anggota baru. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika operasi dan dampak dari kejahatan TRIAD, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk menghadapi ancaman ini.

Referensi

- Baffie, J. (2012). The Chinese TRIADs in South-East Asia: from a “total social phenomenon” to a transnational criminal organisation?. In J.-F. Sabouret (Ed.), *The Asian side of the world* (1–). CNRS Éditions. <https://doi.org/10.4000/books.editions-cnrs.12498>
- Bancroft, T. A. (2007). The TRIADs: Past and Present. In A. Leveau (Ed.), *Investigating the Grey Areas of the Chinese Communities in Southeast Asia* (1–). Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine. <https://doi.org/10.4000/books.irasec.329>
- Buzan B., Weaver O. & Wilde J. 1998. *Security: A Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publisher.
- Cheuk, J. 2021. Overview of Organized Crime in East Asia. Medium. <https://medium.com/@brothernumbertthree/overview-of-organized-crime-in-east-asia-414760449cd0>
- Chin, K. 2013. 10 Chinese Organized Crime. Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730445.013.002>

- Curtis, Glenn E., Seth L. Elan, Rexford A. Hudson, and Nina A. Kollars. 2002. "Transnational Activities of Chinese Crime Organizations." *Trends in Organized Crime* 7 (3): 19–57. <https://doi.org/10.1007/s12117-002-1011-4>.
- Justin Heifetz, Upaya Berbahaya Melacak Jejak Anggota TRIAD, <https://www.vice.com/id/article/wnzpbb/upaya-berbahaya-melacak-jejak-anggota-TRIAD>
- Margarete Sandelowski, "Focus on Research Methods: Whatever Happened to Qualitative Description?," *Research in Nursing & Health* 23 (2000): hal. 335., [https://doi.org/10.1002/1098-240x\(200008\)23:4%3C334::aid-nur9%3E3.0.co;2-g](https://doi.org/10.1002/1098-240x(200008)23:4%3C334::aid-nur9%3E3.0.co;2-g).
- Shoshanna Sofaer, 1999. "Qualitative Methods: What Are They and Why Use Them?," *Health and Services Research* 34, no. 5
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta).
- Wang, P., Kwok SI. Hong Kong TRIADs: the historical and political evolution of urban criminal polity, 1842–2020. *Urban History*. 2023;50(3):445-467. doi:10.1017/S096392682100102